

**KONSISTENSI POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA
TERHADAP TIMUR TENGAH:
ANTARA NILAI NORMATIF DAN RASIONALITAS
GEOPOLITIK**



UNIVERSITAS GADJAH MADA

**Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar
dalam Bidang Geopolitik Timur Tengah
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada**

**Disampaikan pada Pengukuhan Guru Besar
Universitas Gadjah Mada
Tanggal 19 Juni 2025**

**Oleh:
Prof. Dr. Dra. Siti Mutiah Setiawati, M.A.**

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ), dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih

Yang Saya hormati,
Ketua, Sekretaris, dan anggota Majelis Wali Amanat Universitas
Gadjah Mada,
Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Akademik Universitas Gadjah
Mada
Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Guru Besar Universitas Gadjah
Mada
Rektor, Wakil-Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada
Dekan, Wakil-Wakil Dekan, serta Ketua dan Sekretaris Senat,
Dan para Guru Besar di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Gadjah Mada
Para tamu undangan, dan keluarga yang berbahagia,

Assalamualaikum wa rohmatullaahi wa barokaatuh,

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhanaanahu Wa Ta'aalaa* yang telah melimpahkan rahmat, karunia, kasih sayang dan HidayahNya kepada kita semua sehingga bisa hadir di Balai Senat Universitas Gadjah Mada dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah pada Nabi Besar Muhammad *Sallaallahu Alaihi wa Sallam*. Saya dan keluarga mengucapkan banyak terimakasih kepada Ibu-Ibu, Bapak-Bapak dan Saudara-Saudara semua yang hadir pada Rapat Terbuka Universitas Gadjah Mada dalam rangka pengukuhan Guru Besar hari ini. Merupakan kehormatan bagi saya mendapatkan kesempatan menyampaikan pidato pengukuhan Guru Besar di bidang Geopolitik Timur Tengah dengan judul:

Konsistensi Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Timur Tengah: Antara Nilai Normatif dan Rasionalitas Geopolitik

Bapak Ibu yang berbahagia,

Indonesia dan Timur Tengah dua wilayah yang secara geografis berjauhan dengan perbedaan budaya dan bahasa yang signifikan, namun meskipun terpisah oleh ribuan mil kurang lebih 12 jam

penerbangan atau 8249 km, kedua belah pihak memiliki kedekatan hubungan. Fakta sejarah menunjukkan sejak Indonesia menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, dan mendapat kedaulatan pada 27 Desember 1949, Mesir disusul oleh Liga Arab tercatat sebagai negara dan organisasi regional yang pertama mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Beberapa tahun kemudian ketika diselenggarakan Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada April 1955 Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo mengajukan pada Konferensi untuk mengeluarkan pernyataan bersama yang mendukung Hak Rakyat Arab Palestina untuk memperoleh kemerdekaan, dan mendorong PBB untuk mengeluarkan Resolusi penyelesaian konflik Arab Palestina-Israel (Dawisha, 1983).

Kedekatan lain dapat diperhatikan dari istilah politik Indonesia yang sebagian besar berasal dari bahasa Timur Tengah atau bahasa Arab seperti Majelis, Dewan, Perwakilan, Musyawarah, Mufakat, Kursi, Rakyat, Hikmat, Adil dan lain-lain. Kedekatan ini salah satu kemungkinannya karena dua wilayah ini memiliki penduduk yang sebagian besar beragama Islam sehingga bagi masyarakat Indonesia mengunjungi Timur Tengah untuk melakukan perjalanan Haji dan Umroh merupakan ritual keagamaan yang reguler dilakukan. Secara ekonomi, Timur Tengah merupakan tujuan utama Pekerja Migran Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang menjanjikan karena sejak ditemukan minyak sebagian negara Timur Tengah merupakan negara kaya.

Pidato ini merupakan pembahasan politik luar negeri Indonesia terhadap kawasan Timur Tengah, dengan fokus pada satu isu spesifik, yaitu konflik di Timur Tengah. Untuk membahas, meneliti, atau memahami isu politik luar negeri suatu negara, kita memerlukan cara pandang atau kerangka pembahasan tertentu. Dalam hal ini, pidato ini menggunakan pendekatan tematik yang terbatas pada satu isu saja. Leo Suryadinata mengelompokkan berbagai tulisan politik luar negeri Indonesia ke dalam kategori “mikro” dan “makro”—bukan sebagai pendekatan analitis, melainkan sebagai cara mengklasifikasikan cakupan pembahasan. Kategori “mikro” mencakup tulisan-tulisan yang membahas isu spesifik dalam politik luar negeri, seperti karya John M. Reinhard, J.A.C. Mackie, David Mazingo, Dewi Fortuna Anwar, dan

Rizal Sukma. Misalnya, tulisan Dewi Fortuna Anwar membahas hubungan Indonesia dan ASEAN, sementara Rizal Sukma membahas demokrasi dalam politik luar negeri Indonesia. Dengan kerangka tematik seperti ini, pidato ini akan memusatkan perhatian pada satu isu saja, yaitu dukungan Indonesia terhadap penyelesaian konflik di Timur Tengah (Suryadinata, 1996).

Pertanyaan yang ingin dijawab dalam pidato ini adalah: bagaimana konsistensi sikap politik luar negeri Indonesia terhadap konflik di Timur Tengah dapat dipahami dan dikaji ulang, mengingat kawasan tersebut secara geografis cukup jauh dari Indonesia dan secara historis tidak semua konflik di kawasan itu mendapat perhatian atau dukungan yang seragam. Jika memang terdapat pola konsistensi dalam respons Indonesia, maka hal tersebut tidak dapat dijelaskan hanya melalui kedekatan geografis atau sentimen normatif, melainkan memerlukan pembacaan ulang yang mempertimbangkan kompleksitas dinamika geopolitik global dan regional.

Dalam konteks ini, "konsistensi" yang dimaksud merujuk pada keberlanjutan dukungan Indonesia terhadap prinsip-prinsip perdamaian dan stabilitas kawasan, yang antara lain tercermin dalam sikap proaktif terhadap isu Palestina dan dukungan terhadap solusi dua negara. Sikap ini telah hadir sejak masa Presiden Soekarno dan terus menjadi bagian dari wacana resmi politik luar negeri Indonesia. Namun, posisi Indonesia terhadap konflik-konflik Timur Tengah dalam praktiknya menunjukkan variasi, bahkan kompromi pragmatis, seperti dalam pengadaan teknologi persenjataan dan pengawasan dari Israel demi memenuhi kepentingan pertahanan nasional. Oleh karena itu, perlu dianalisis lebih lanjut bagaimana prinsip normatif ini dijalankan secara selektif dalam konteks realitas geopolitik dan tekanan struktural global.

Tulisan ini menggunakan pendekatan geopolitik sebagai kerangka utama untuk memahami konsistensi politik luar negeri Indonesia terhadap konflik di Timur Tengah. Geopolitik dalam konteks ini tidak hanya mencakup faktor-faktor geografis seperti posisi strategis kawasan, sumber daya, dan konfigurasi demografis, tetapi juga mencakup bagaimana negara-negara—termasuk Indonesia—membaca dan merespons dinamika kekuasaan global yang memengaruhi kawasan tersebut. Di dalam pendekatan ini, *Great Power Approach* digunakan

sebagai perangkat konseptual untuk menjelaskan keterbatasan otonomi negara berkembang, seperti Indonesia, dalam menentukan kebijakan luar negeri. (Korany, B dan Dessouki, AH,2019). Negara-negara berkembang cenderung terjebak dalam struktur sistem internasional yang didominasi oleh negara-negara besar (*great powers*), sehingga pilihan kebijakannya kerap kali lebih merupakan hasil kalkulasi terhadap tekanan dan kepentingan eksternal, daripada ekspresi penuh dari nilai-nilai domestik. Dalam konteks ini, pendekatan ini kemudian memunculkan istilah Orientasi dalam Politik Luar Negeri yaitu cara elite politik luar negeri sebuah negara mempersepsikan dunia dan peran negaranya di dunia.¹ (Dawisha, A, 1983).

Konsistensi dukungan Indonesia terhadap prinsip-prinsip universal seperti hak asasi manusia dan solusi dua negara seringkali berada dalam ketegangan dengan kebijakan luar negeri yang lebih pragmatis, misalnya dalam pemenuhan kebutuhan pertahanan nasional. Oleh karena itu, pidato ini akan membaca ulang konsistensi tersebut sebagai hasil dialektika antara prinsip normatif dan kalkulasi geopolitik praktis yang terus berlangsung dalam dinamika kawasan Timur Tengah.

Secara garis besar politik luar negeri dapat didefinisikan sebagai formulasi kebijakan suatu negara yang dibuat oleh Kepala Negara

¹ Ali E Hillal Dessouki dan Baghat Korany membedakan pendekatan Politik Luar Negeri negara sedang berkembang menjadi 3; Pertama *Psychological Approach* atau pendekatan Psikologis yaitu pendekatan yang menjelaskan politik luar negeri suatu negara sebagai fungsi impuls dan idiosinkratik dari pemimpin atau Kepala Negara (Presiden, Perdana Menteri, dan Raja). Pendekatan ini menekankan bahwa politik luar negeri suatu negara sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologis para pemimpin negara tersebut. Misalnya memahami politik luar negeri Indonesia dibawah Presiden Soekarno harus melihat kondisi psikologis Presiden pada waktu itu yang mempunyai pengalaman seringkali dipenjarakan oleh Belanda sehingga sangat membenci imperialisme. Kedua, *Great Power Approach*, seperti tersebut di atas. Ketiga, *Reductionist or Model Builder Approach* yaitu pendekatan politik luar negeri negara sedang berkembang yang ditentukan oleh proses dan perhitungan yang sama dengan politik luar negeri negara maju. Misalnya kecenderungan membentuk organisasi regional seperti Uni Eropa atau NAFTA (North American Free Trade Area) diikuti pula oleh beberapa negara berkembang dengan bergabung dengan negara yang mempunyai kedekatan regional seperti keputusan Indonesia bergabung dengan APEC (Asia Pacific Economic Cooperation), atau bergabung dengan Kelompok G-20.

bersama Parlemen ditujukan kepada masyarakat internasional baik negara, organisasi internasional maupun regional yang diimplementasikan terutama oleh Menteri Luar Negeri yang memimpin Kementerian Luar Negeri (disarikan dari berbagai sumber) sedangkan definisi yang dikemukakan oleh George Modelski yang mengatakan : “ *Foreign policy is the system of activities evolved by the communities for changing the behavior of other state and for adjusting their own activities to the international environment.*” (Kegley, CW, dan Wittkopf, ER, 1997). Definisi ini mengindikasikan bahwa tujuan politik luar negeri untuk negara maju berbeda dari negara berkembang. Kekuatan besar (*superpower*) dengan sumber daya yang nyaris tak terbatas cenderung menjadikan politik luar negerinya sebagai alat untuk mengubah atau memengaruhi sikap politik negara lain. Sebaliknya, negara-negara berkembang umumnya menjalankan politik luar negeri yang berorientasi pada upaya bertahan dan menyesuaikan diri terhadap tekanan-tekanan dari lingkungan internasional.

Untuk menghindari cakupan yang terlalu luas dalam kajian politik luar negeri, Adeed Dawisha (1983) mengklasifikasikan ruang lingkup analisis kebijakan luar negeri ke dalam tiga kategori utama: (1) faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan, (2) proses pengambilan keputusan, dan (3) implementasi kebijakan luar negeri. Meskipun pembagian ini bersifat konseptual, ia berguna untuk membantu pemetaan aspek-aspek yang relevan dalam suatu analisis. Dalam pidato ini, pembahasan difokuskan pada aspek implementasi politik luar negeri Indonesia dalam mendukung penyelesaian konflik di Timur Tengah.² Namun, implementasi ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi struktural dan spasial yang melingkupinya—yaitu dinamika geopolitik kawasan dan tekanan dari sistem internasional.

² Di samping pendekatan-pendekatan tersebut di atas dalam pembahasan politik luar negeri yang lebih dalam, menyeluruh, dan detail seperti penelitian dalam disertasi ada pendekatan lain yaitu Model Strategis atau Rasional adalah pendekatan yang mengamati interaksi politik luar negeri berbagai negara dan bagaimana sebuah negara menanggapi interaksi tersebut dengan perhitungan yang rasional. Atau pendekatan politik luar negeri yang dikembangkan oleh Richard Snyder yang menekankan pada dimensi manusia dalam pengambilan keputusan politik luar negeri.

Maka dari itu, kerangka geopolitik digunakan sebagai pendekatan utama untuk membaca orientasi kebijakan luar negeri Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan lokasi dan posisi strategis Timur Tengah, tetapi juga mencakup bagaimana struktur kekuatan global (sebagaimana dijelaskan dalam *Great Power Approach*) membatasi ruang gerak negara berkembang seperti Indonesia. Dalam kerangka geopolitik, tekanan global tersebut dilihat sebagai bagian dari medan yang membentuk kalkulasi strategis kebijakan luar negeri Indonesia.

Untuk mendukung analisis ini, kerangka dari Dawisha tetap digunakan sebagai pelengkap, terutama dalam aspek pertama: faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan luar negeri. Faktor domestik yang diperhitungkan mencakup identitas keagamaan mayoritas, komitmen terhadap solidaritas Global South, serta nilai-nilai universal seperti keadilan dan kemanusiaan. Sementara itu, faktor eksternal mencakup sistem internasional yang asimetris dan berlapis kepentingan kekuatan besar. Dalam konteks ini, pernyataan Dawisha bahwa *"Islam would constitute a significant influence on policy in the Muslim world"* memberi lapisan kultural dalam membaca dukungan Indonesia terhadap isu Palestina. (Dawisha, 1985) Namun demikian, pendekatan geopolitik memberikan ruang yang lebih komprehensif untuk menjelaskan bagaimana pertimbangan spasial, struktural, dan normatif bertemu dan bernegosiasi dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Dengan pendekatan ini, konsistensi ataupun ketidakkonsistenan dalam dukungan Indonesia terhadap penyelesaian konflik di Timur Tengah dapat dianalisis sebagai hasil dari interaksi antara nilai-nilai domestik dan realitas kekuatan global yang membentuk lanskap geopolitik kawasan.

Pembahasan mengenai implementasi politik luar negeri selalu dikaitkan dengan prinsip politik luar negeri yang dianut suatu negara, pelaksanaannya, serta reaksi dari dalam negeri maupun masyarakat internasional terhadap tindakan tersebut. Terdapat sekurang-kurangnya tiga prinsip politik luar negeri Indonesia yang secara eksplisit dinyatakan atau diakui secara hukum. Pertama, dan yang paling utama, adalah prinsip bebas-aktif, yaitu prinsip yang dikemukakan oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta pada 2 September 1948 di hadapan Komite

Nasional Indonesia Pusat di Yogyakarta. Pada dasarnya, prinsip ini mencerminkan pemikiran tentang bagaimana Indonesia harus bersikap dalam menghadapi situasi persaingan internasional antara Blok Barat dan Blok Timur—yakni dengan tidak memihak salah satu pihak, tetapi tetap aktif dalam upaya penyelesaian berbagai permasalahan internasional.

Dalam pelaksanaannya, prinsip politik luar negeri bebas-aktif diterjemahkan secara berbeda-beda oleh setiap presiden. Selain itu, situasi internasional telah mengalami banyak perubahan dari sistem bipolar ke unipolar, dan kini menuju tatanan multipolar sehingga banyak pengamat politik luar negeri Indonesia mulai mempertanyakan sejauh mana prinsip ini masih relevan bagi kepentingan nasional Indonesia. Meskipun demikian, hingga kini belum ada presiden yang secara eksplisit mencoba mengubah atau meninjau kembali prinsip politik luar negeri bebas-aktif, sehingga prinsip ini tetap menjadi fondasi kebijakan luar negeri Indonesia.

Prinsip kedua tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan: "*Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan*", serta "*ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial*". Selain itu, terdapat pula prinsip untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang kemudian berkembang menjadi komitmen untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Prinsip ketiga adalah *good neighbour policy* atau kebijakan bertetangga baik. Prinsip ini merupakan inisiatif Presiden Soeharto setelah Indonesia melancarkan konfrontasi terhadap Malaysia dalam operasi *Ganyang Malaysia* pada tahun 1963. Presiden Soeharto kemudian berupaya membangun hubungan baik dengan negara-negara tetangga, yang diwujudkan melalui prakarsa pembentukan ASEAN—asosiasi negara-negara Asia Tenggara. Dengan prinsip ini, Indonesia menekankan pentingnya menjalin hubungan harmonis dengan negara-negara tetangganya.

Dengan demikian, politik luar negeri suatu negara dapat dianalisis atau dievaluasi dari berbagai pendekatan, ruang lingkup,

teori-teori, dan isu-isu politik luar negeri yang sedang dihadapi. Namun demikian, terdapat juga pendekatan yang lebih bersifat deskriptif-kronologis, seperti yang dilakukan oleh Michael Leifer (1983), atau yang berfokus pada perilaku dan budaya politik, sebagaimana terlihat dalam karya Leo Suryadinata. Dalam bukunya, Suryadinata (1996) menunjukkan bahwa perilaku politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kekuatan militer, persepsi pemimpin terhadap isu luar negeri, serta budaya dan institusi politik nasional.

Dalam implementasi politik luar negeri Indonesia terhadap Timur Tengah, politik luar negeri Indonesia konsisten mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina dan berpartisipasi dalam penyelesaian konflik-konflik di kawasan tersebut. Konsistensi dukungan Indonesia ini memberikan dampak positif bagi politik luar negeri Indonesia, yaitu memberi identitas posisi Indonesia dalam ikut melaksanakan ketertiban dunia serta mewujudkan perdamaian dunia sebagai prinsip utama politik luar negeri Indonesia. Meskipun demikian, dukungan Indonesia terhadap konflik Timur Tengah terkadang menimbulkan dilema. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pihak-pihak yang berkonflik tidak memiliki masalah langsung dengan Indonesia, sementara Indonesia terikat pada prinsip-prinsip politik luar negeri yang harus ditaati.

Bapak dan Ibu yang saya hormati,

Tujuan pidato ini adalah menunjukkan bahwa politik luar negeri Indonesia terhadap Timur Tengah berhasil membentuk identitas Indonesia di panggung internasional, sekaligus mewarnai posisi Indonesia dalam ikut melaksanakan ketertiban dunia dan menghapuskan penjajahan yang bertentangan dengan perikemanusiaan dan keadilan, sesuai dengan prinsip politik luar negeri Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam konteks ini, keterlibatan aktif Indonesia dalam penyelesaian konflik mencerminkan prinsip “bebas-aktif” yang ditetapkan oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta pada tahun 1948, yaitu sikap tidak memihak kekuatan dunia besar namun aktif dalam menyikapi isu internasional. Dalam kesempatan ini, saya akan membatasi pembahasan pada konflik-konflik utama dalam pergolakan

politik Timur Tengah kontemporer, dengan konflik Palestina-Israel sebagai fokus utama.

Dukungan konsisten Indonesia terhadap perjuangan Palestina dan keterlibatan dalam konflik-konflik utama di Timur Tengah dapat dibaca melalui pendekatan geopolitik. Dalam konteks ini, geopolitik bukan hanya dipahami sebagai hubungan antara kekuasaan dan ruang geografis, tetapi sebagai kerangka analitis yang menempatkan pertimbangan spasial, posisi strategis, dan konfigurasi kekuatan global sebagai penentu utama kebijakan luar negeri. Seperti dinyatakan oleh Cope (2024), geopolitik adalah kajian di persimpangan antara geografi, strategi, politik, dan sejarah, yang mengkaji bagaimana faktor-faktor seperti lokasi perbatasan, sumber daya alam, demografi spasial, dan posisi strategis memengaruhi urusan global. Dalam hal ini, Indonesia — meski secara geografis tidak berada di kawasan Timur Tengah — melihat stabilitas kawasan tersebut sebagai bagian dari kepentingan strategisnya, baik karena alasan sejarah, solidaritas dunia Islam, maupun posisi Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim non-Arab terbesar.

Pidato ini mengambil posisi dalam tradisi geopolitik kritis yang menekankan keterbatasan negara-negara berkembang dalam menentukan orientasi luar negerinya secara mandiri. Di sinilah pendekatan geopolitik bertemu dengan kerangka *Great Power Approach*: tekanan struktural dari kekuatan besar global memengaruhi kalkulasi kebijakan luar negeri Indonesia, yang tidak sepenuhnya bisa dijelaskan melalui nilai-nilai normatif atau preferensi domestik semata. Dengan menempatkan kajian ini dalam kerangka geopolitik, pidato ini tidak hanya menafsirkan peta politik luar negeri Indonesia di Timur Tengah, tetapi juga menunjukkan bagaimana konsep-konsep geopolitik klasik dan kontemporer dapat dipakai untuk menjelaskan dinamika konsistensi dan inkonsistensi, kontinuitas dan deviasi, dalam sikap Indonesia terhadap konflik-konflik utama seperti Palestina-Israel, Saudi-Iran, atau konflik internal Suriah.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, meskipun Indonesia berjarak jauh secara geografis, terdapat ikatan yang kuat berupa persamaan agama, orientasi politik luar negeri, serta solidaritas sebagai negara-negara yang tergabung dalam *Global South*, menjadikan Timur

Tengah sebagai prioritas politik luar negeri Indonesia. (Winati & Alvian, 2021). Pertimbangan geopolitik ini ditambah prinsip politik luar negeri Indonesia yang tidak memihak dalam persaingan *superpower*, ikut melaksanakan ketertiban dunia, dan menghapuskan penjajahan di muka bumi mendorong Indonesia mendukung perjuangan negara-negara yang masih terjajah termasuk, dan berpartisipasi dalam penyelesaian konflik mereka.

Timur Tengah menjadi perhatian warga dunia, termasuk Indonesia, karena memiliki keunggulan geopolitik yang tidak dimiliki oleh region (wilayah lain) seperti Eropa, Asia, ataupun Amerika. Pertama, sebagian besar penduduknya beragama Islam (93%). Sebagian kecil beragama Yahudi (3%), Nasrani (3%), dan Paganisme (1%). Kedua, wilayah ini memiliki lebih dari 60% cadangan minyak dunia dan menyumbang lebih dari 50% produksi minyak dunia. Data mutakhir menunjukkan bahwa Timur Tengah memiliki 49% cadangan minyak dunia (Schwartz, A., 2024, dalam Cope, Z., 2024). Sembilan dari sepuluh ladang minyak terbesar di dunia berada di wilayah ini. (Drysedale, A, Blake, G,H, 1985) Ketiga, sebagian besar penduduknya berbangsa dan berbahasa Arab. Sebagian kecil lainnya berasal dari bangsa Persia, Turki, Yahudi (Ibrani), Afghan, Berber, Kurdi, Hitti, dan Armenia. Keempat, Timur Tengah merupakan tempat lahirnya tiga agama besar: Islam, Kristen, dan Yahudi. Oleh karena itu, tempat-tempat suci ketiga agama tersebut juga berada di wilayah ini.

- Islam: Makkah, Madinah, dan Jerusalem (Masjidil Aqsa)
- Kristen: Via Dolorosa (Jalan Salib, Jerusalem), tempat kelahiran Yesus di Bethlehem, dan tempat ia dibesarkan di Nazareth
- Yahudi: Tembok Ratapan atau *Wailing Wall* (Jerusalem)

Kelima, posisinya sangat strategis karena menjadi penghubung antara benua Eropa, Afrika, dan Asia. Meskipun secara geografis sebagian besar berada di Asia, Timur Tengah memiliki keterkaitan erat dengan Eropa, Laut Tengah (Mediterrania), Afrika, dan India (Rasheed, 2019).

Indonesia memandang kawasan Timur Tengah secara geopolitik bukan sebagai wilayah yang homogen, meskipun disatukan oleh persamaan etnis, bahasa dan budaya Arab, serta agama Islam. Negara-negara di kawasan Timur Tengah memiliki perbedaan sikap

politik yang dipengaruhi oleh posisi geografis masing-masing. Secara geografis, negara-negara di Timur Tengah terbagi menjadi beberapa wilayah, yaitu Afrika Utara, Asia Barat, Semenanjung Arab, wilayah Teluk (Teluk Arab/Parsi), dan sebagian kecil di Eropa. Perbedaan posisi geografis ini sejalan dengan perbedaan sikap politik di antara negara-negara tersebut. Kompleksitas dan jenis konflik di Afrika Utara berbeda dari yang terjadi di Asia Barat, Semenanjung Arab, dan wilayah Teluk. Terdapat kecenderungan bahwa negara-negara di wilayah Teluk—yang sebagian besar merupakan penghasil minyak—serta negara-negara di Asia Barat yang mencakup keberadaan Israel, memiliki potensi konflik yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara di Afrika Utara. Perang dan konflik lebih sering terjadi di wilayah ini, seperti Perang Saudara di Suriah dan Lebanon, konflik atau perang Arab–Palestina–Israel, Perang Irak–Iran, Perang Irak–Kuwait, konflik Arab Saudi–Yaman, dan ketegangan antara Arab Saudi dan Qatar.

Pertimbangan Indonesia untuk mendukung dan bahkan aktif terlibat dalam penyelesaian konflik di Timur Tengah didasarkan pada pertimbangan geopolitik yang kuat. Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, memiliki ikatan historis dan kultural dengan Timur Tengah yang juga mayoritas penduduknya beragama Islam, serta memiliki tempat-tempat suci agama yang menjadi tujuan kunjungan banyak warga Indonesia, tidak hanya bagi yang beragama Islam.

Faktor geopolitik Indonesia menunjukkan beberapa keistimewaan. Pertama, posisi geografis Indonesia yang berada di antara benua Asia dan Australia menjadikan Indonesia termasuk dalam kategori “*choke point*” atau jalur lintasan strategis penting. Kedua, bentuk geografis Indonesia sebagai negara kepulauan memerlukan perhatian ekstra dalam perumusan kebijakan politik dalam negeri dan, yang lebih utama, politik luar negeri. Meskipun demikian, jika wilayah-wilayah kepulauan ini disatukan, bentuk negara yang dihasilkan cenderung menyerupai segi empat, yang menurut pendekatan geopolitik merupakan bentuk negara yang ideal. Ketiga, kekayaan alam Indonesia, berupa minyak bumi, hasil tambang, hutan, hasil perkebunan, dan perikanan, sudah diakui sebagai sumber daya yang tidak dimiliki oleh negara-negara tetangga. Keempat, jumlah penduduk

Indonesia menurut sensus tahun 2020 telah mencapai 270.203.917 jiwa (BPS, 2020), sehingga Indonesia menempati posisi ke-4 sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia setelah Amerika Serikat, yang merupakan potensi kekuatan yang luar biasa.

Pertimbangan kedua adalah dalam rangka menjalankan prinsip politik luar negeri yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu menghapuskan penjajahan dan ikut melaksanakan ketertiban dunia (lihat pembahasan di atas). Pertimbangan ekonomi tentu saja ada. Dahulu, Indonesia pernah terikat dengan negara-negara Timur Tengah dalam OPEC (Asosiasi Negara-Negara Pengekspor Minyak), namun saat ini tidak lagi. Meskipun demikian, sekitar 1 juta pekerja migran Indonesia bekerja di beberapa negara Timur Tengah dan mengirimkan uangnya ke Indonesia (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 2024). Masalah ekonomi tidak menjadi bahasan dalam pidato kali ini.

Bagi Indonesia, pertimbangan geopolitik Timur Tengah yang menjadi perhatian lebih lanjut adalah heterogenitas penduduk, tempat tinggal, wilayah konflik, kehadiran kekuatan asing di wilayah ini, serta munculnya gerakan politik Islam yang dikategorikan oleh Barat sebagai gerakan terorisme. Sementara itu, negara-negara asal gerakan tersebut menganggap mereka sebagai pahlawan, seperti FIS (Front Islamique du Salut), HAMAS, Hizbullah, Ikhwanul Muslimin, Revolusi Islam Iran, ISIS, dan Al Nahda. Faktor geografis tempat lahir gerakan-gerakan politik Islam tersebut menjadi perhatian khusus bagi Indonesia karena dikhawatirkan akan terjadi perluasan ideologi mereka. Hal ini mengingat penduduk Indonesia yang secara agama 87% beragama Islam (Suryadinata, 1995), sehingga pengaruh Islam Timur Tengah berpotensi memengaruhi Islam di Indonesia. Namun, dengan mempertimbangkan bahwa Indonesia bukan negara yang homogen dan masih ada kelompok agama non-Islam yang dianut masyarakat, kekhawatiran terhadap perluasan ideologi gerakan politik Islam tersebut masih dapat terkontrol (Suryadinata, 1995).

Bapak dan Ibu yang Saya hormati,

Berikut adalah sikap Indonesia terhadap konflik di Timur Tengah yang diwujudkan melalui partisipasi dalam penyelesaian konflik, baik sebagai mediator, fasilitator, maupun dengan bersikap

netral, tergantung pada jenis konfliknya. Partisipasi tersebut dibagi menjadi dua, yaitu melalui diplomasi dan bantuan fisik/material. Dalam praktik diplomasi, Indonesia melakukan kunjungan kepada pihak-pihak yang berkonflik untuk menyampaikan pandangannya dan mencari solusi. Diplomat Indonesia mengunjungi negara-negara yang sedang mengalami konflik untuk berdialog dan menyuarakan posisi Indonesia. Selain itu, Indonesia juga melakukan diplomasi melalui media massa, yang dikenal sebagai “*megaphone diplomacy*,” yaitu menyampaikan pernyataan kepada publik secara terbuka. Partisipasi material diwujudkan dengan memberikan bantuan finansial, obat-obatan, pendirian rumah sakit, pengiriman pasukan perdamaian, serta pendirian Konsulat Jenderal khusus. Pembahasan akan dimulai dari partisipasi Indonesia dalam penyelesaian konflik Arab Palestina–Israel.

Dukungan Terhadap Palestina Merdeka

Pemerintah Indonesia menghadapi beberapa kesulitan dalam memberikan dukungan kepada Palestina, antara lain: Pertama, adanya perpecahan tajam di antara kelompok-kelompok pejuang Palestina, terutama antara Hamas yang lebih banyak menguasai Gaza, dan Fatah yang dianggap moderat dan berpusat di West Bank. Indonesia dituntut memahami posisi geografis serta dinamika kedua kekuatan ini agar dukungan yang diberikan tidak salah arah. Indonesia juga mengalami kesulitan dalam upaya mendamaikan kedua kelompok tersebut demi menghadapi tantangan bersama dari Israel. Kedua, Israel sebagai pihak yang menguasai wilayah Palestina didukung secara kuat oleh Amerika Serikat sebagai kekuatan utama dunia (*superpower*), sehingga pengaruh Amerika sangat menentukan dalam proses penyelesaian konflik. Semua upaya penyelesaian sangat bergantung pada kemauan politik Amerika Serikat dan sekutunya.

Ketiga, negara-negara Arab yang tergabung dalam Liga Arab telah menjadikan masalah Palestina sebagai isu bersama atau *all-Arab core concerns* (Hudson, 1977). Namun, mereka kurang menunjukkan solidaritas dan integritas yang memadai untuk mendukung kemerdekaan Palestina karena di antara mereka sendiri sedang terlibat konflik internal maupun konflik antarsesama negara Arab. Beberapa negara Arab yang dahulu aktif membela Palestina kini justru menjalin

hubungan lebih dekat dengan Israel dengan membuka hubungan diplomatik, seperti Mesir dan Yordania, dengan alasan kepentingan nasional masing-masing. Normalisasi hubungan negara-negara Arab dengan Israel cenderung meningkat setelah adanya *Abraham Accord* pada tahun 2020, ketika beberapa negara Arab mulai menjalin hubungan resmi dengan Israel, seperti yang dilakukan Uni Emirat Arab pada Agustus 2020, disusul Bahrain (September 2020), Sudan (Oktober 2020), serta Maroko (Desember 2020) (Cope, Z., 2024).

Keempat, seluruh perundingan antara pihak Arab-Palestina dan Israel tidak pernah secara eksplisit membahas kemerdekaan Palestina. Sejak *Perundingan Madrid* (1991), *Oslo I dan II* (1993–1995), *Washington Summit* (1998), *Camp David II* (2000), hingga *Perundingan Annapolis* (2007), isu utama kemerdekaan Palestina tidak menjadi pokok bahasan. Padahal, dalam konteks penyelesaian konflik antara negara penjajah dan yang dijajah, pembahasan mengenai kemerdekaan negara yang dijajah seharusnya menjadi syarat utama (Kelman, H.C., 2017).

Sejak awal kemerdekaannya hingga saat ini, pemerintah Indonesia secara konsisten mendukung perjuangan bangsa Arab Palestina untuk merdeka. Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, menunjukkan dukungan tersebut dengan tidak mengundang Israel tetapi justru mengundang perwakilan Palestina, Muhammad Amin al-Husseini, dalam Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tahun 1955. Presiden kedua, Soeharto, memperkuat dukungan tersebut dengan membuka kantor perwakilan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Jakarta serta memberikan bantuan finansial kepada PLO (Sidqi, 2022). Presiden keempat, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), membatalkan rencana pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel karena mempertimbangkan keberatan luas dari masyarakat Indonesia. Presiden kelima, Megawati Soekarnoputri, menegaskan dalam Sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Kuala Lumpur tahun 2003 bahwa “tidak akan ada perdamaian dunia tanpa kemerdekaan Palestina.”

Presiden keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menunjukkan dukungan simbolik dan politis dengan menjadikan Mesir sebagai negara pertama yang dikunjungi setelah menjabat, yakni untuk menghadiri pemakaman Ketua PLO, Yasser Arafat, pada tahun 2004.

Selain itu, Presiden SBY juga mengirim pasukan perdamaian Indonesia dalam misi *United Nations Interim Force in Lebanon* (UNIFIL) sejak tahun 2006. Ia juga mengambil peran sebagai fasilitator dalam konflik internal Palestina, dengan menjadi tuan rumah perundingan antara dua faksi utama: Hamas yang lebih keras, dan Fatah yang moderat. Kedua gerakan politik ini memiliki perbedaan perspektif yang signifikan dan telah berjuang untuk mencapai titik temu, dengan Jakarta menjadi salah satu tempat yang memungkinkan untuk dialog.

Presiden Joko Widodo melanjutkan konsistensi dukungan Indonesia terhadap perjuangan Palestina, antara lain dengan mendirikan Konsulat Kehormatan Republik Indonesia di Ramallah. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina berlangsung secara berkelanjutan dari satu presiden ke presiden berikutnya. Bagian berikut akan memfokuskan pembahasan pada bentuk dukungan Indonesia terhadap Palestina selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, khususnya dalam merespons agresi militer Israel yang mengakibatkan krisis kemanusiaan besar di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Dukungan Indonesia diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain: bantuan langsung berupa dana, makanan, pakaian, dan layanan kesehatan; dukungan infrastruktur seperti pendirian Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang dibangun melalui kerja sama Palang Merah Indonesia dan Komite Penyelamatan Darurat Medis (MER-C); penguatan kapasitas (*capacity building*); serta dukungan politik melalui jalur diplomasi bilateral, multilateral, dan regional. Selain itu, Indonesia juga berkontribusi dalam pengiriman pasukan perdamaian serta membuka Konsulat Jenderal khusus untuk Palestina. Dalam pidato ini, pembahasan akan difokuskan pada dimensi dukungan politik Indonesia terhadap Palestina, termasuk dinamika diplomasi yang dijalankan dalam forum internasional.

Israel dan beberapa negara Arab—terutama Mesir, Yordania, Suriah, dan Irak—telah terlibat dalam konflik militer sejak tahun 1948, yakni ketika Israel secara sepihak menyatakan kemerdekaannya (Lesch, D. W., 2018). Sejak saat itu, Israel mempertahankan pendudukan atas sejumlah wilayah yang secara historis dimiliki pihak Arab, yaitu Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Dataran Tinggi Golan). Ketiga wilayah ini memiliki keunggulan geopolitik yang signifikan, sehingga kecil

kemungkinan Israel akan mengembalikannya kepada Palestina atau negara-negara Arab terkait. Jalur Gaza merupakan kawasan strategis di pesisir Laut Mediterania yang sangat padat penduduk, serta telah menjadi pusat perlawanan terhadap pendudukan sejak sebelum berdirinya negara Israel. Tepi Barat—yang oleh kaum Yahudi disebut sebagai wilayah Judea dan Samaria—dianggap sebagai tanah yang dijanjikan Tuhan (Yahweh) bagi bangsa Yahudi menurut kepercayaan mereka. Sementara itu, Dataran Tinggi Golan adalah wilayah berbukit yang sangat strategis bagi Israel, karena memungkinkan pengawasan terhadap pergerakan militer dari Suriah dan Lebanon, serta berfungsi sebagai titik kendali atas sumber daya air penting, termasuk Sungai Litani, yang menjadi salah satu sumber utama air bagi Israel. Meskipun berbagai upaya diplomatik telah dilakukan untuk mendorong pengembalian wilayah-wilayah tersebut, hingga kini belum ada kemajuan signifikan yang dapat mengarah pada penyelesaian permanen atas status wilayah pendudukan tersebut.

Sejak dimulainya konflik antara orang Arab Palestina dan Israel tersebut, Indonesia, sebagai negara yang baru merdeka, secara konsisten menunjukkan dukungan untuk kemerdekaan Palestina. Negara ini telah berpartisipasi aktif dalam penyelesaian konflik Arab-Israel, yang secara signifikan berkontribusi pada penerapan aturan hukum untuk mendorong perdamaian. Partisipasi ini termasuk pengiriman pasukan penjaga perdamaian pasca-Perang Sinai pada tahun 1956, sebagai bagian dari Pasukan Baru Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Emergency Force (UNEF)). Pasukan Penjaga Perdamaian Indonesia di Sinai dengan Kontingen Garuda (KONGA)

Selain itu, Indonesia mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke Lebanon sebagai bagian dari Pasukan PBB di Lebanon (United Nations Interim Force in Lebanon/UNIFIL), terutama setelah serangan Israel ke wilayah Lebanon Selatan pada tahun 2006. Pada tahun 2015, pemerintah Indonesia berjanji untuk mengerahkan 4.000 pasukan penjaga perdamaian dan bertujuan untuk menjadi salah satu dari 10 kontributor teratas PBB pada tahun 2019 (Kumar et al., 2020). Peran ini berjalan lancar hingga saat ini meskipun Israel menolak untuk menerima pasukan penjaga perdamaian dari Indonesia yang dianggap tidak netral karena pro-Palestina, dan selalu yang terus menjadi

penengah dalam konflik internal Palestina antara kelompok Hamas dan Fatah di wilayah Otoritas Palestina.

Hamas yang dikenal sebagai Gerakan Perlawanan Islam, yang didirikan pada tahun 1987 oleh Ahmad Shah Yassin, dianggap sebagai entitas politik Islam garis keras. Tujuan utamanya adalah untuk menegakkan hukum Islam (Syariah Islam) dan mendirikan negara Islam yang merdeka di Palestina. Sementara itu, kelompok Fatah, yang didirikan oleh Yasser Arafat pada tahun 1967, membayangkan Palestina sebagai negara sekuler, yang menganjurkan pemisahan agama dan urusan negara. Perbedaan ideologis yang mendalam antara Hamas dan Fatah membentuk dasar identitas yang menarik pendukung yang berbeda.

Hamas memperoleh dukungan yang signifikan setelah kemenangan pemilihan Otoritas Palestina tahun 2006, yang kemudian dibatalkan. Dalam tingkat internasional, AS dan negara-negara sekutunya mengklasifikasikan Hamas sebagai organisasi teroris karena seringnya menggunakan kekerasan. Perang atau konflik pasca-2006 antara kedua kelompok HAMAS dan Fatah mengakibatkan kematian tragis sedikitnya 600 warga Palestina dari kedua belah pihak. Fatah saat ini dipimpin oleh Mahmoud Abbas, Presiden Palestina yang menguasai wilayah (Otoritas Nasional Palestina), yang sebagian besar terletak di Tepi Barat (Tartir, A, 2017). Sementara itu, di bawah kepemimpinan Khaled Meshal, Hamas mendominasi wilayah di Jalur Gaza.

Perbedaan ideologi antara Hamas dan Fatah juga terlihat dalam sikap terhadap Israel (Tzoreff, Y., & Michael, K. 2022). Hamas yang dikenal dengan sikapnya yang tidak kenal kompromi dan tidak mau mengakui keberadaan Israel (Challand, B. 2009) /dituduh sebagai dalang di balik serangan roket Katyusha yang memicu respons militer dari Israel pada tahun 2008 dan 2014, yang mengakibatkan kerusakan besar dan jatuhnya korban jiwa baik di pihak Hamas maupun warga Gaza. Sementara itu, Fatah bersikap lebih moderat dengan mengakui Israel dan bersedia berunding dengan negara Yahudi tersebut. Berdasarkan latar belakang atau konteks tersebut, andaikan Indonesia ingin bertindak sebagai penengah atau mediator, menjaga netralitas di tengah perbedaan ideologi tersebut menjadi krusial karena perlu mendapatkan kepercayaan dari kedua belah pihak.

Indonesia memperoleh kepercayaan dari kelompok Fatah, sebagaimana terlihat ketika Presiden Mahmoud Abbas mengirimkan utusannya untuk bertemu dengan Presiden Prabowo pada 18 Maret 2025. Sementara itu, dari pihak Hamas, Indonesia diakui sebagai negara yang berkontribusi dalam pembukaan perbatasan Rafah antara Palestina dan Mesir saat serangan Israel ke Gaza pada tahun 2008. Namun demikian, pemerintah Indonesia bersikap lebih hati-hati dalam membina hubungan dengan Hamas, karena kelompok ini sering dipandang sebagai faksi yang bergaris keras. Oleh sebab itu, Indonesia lebih memilih menjalin hubungan diplomatik dengan Fatah yang dianggap sebagai representasi resmi dari Pemerintahan Otoritas Palestina. Meskipun begitu, mengingat posisi Hamas sebagai salah satu aktor utama dalam konflik internal Palestina, keterlibatan mereka tetap diperlukan dalam setiap upaya penyelesaian yang komprehensif.

Presiden Jokowi secara konsisten mendukung perjuangan Palestina baik materiil yang diwujudkan dengan bantuan kemanusiaan kebutuhan pokok seperti baju, pangan, air, dan obat-obatan (Chandra, A. A., et al, 2024), dan dukungan politik yang berupa diplomasi. Untuk menunjukkan komitmen ini, Konsulat Indonesia yang pertama didirikan di Ramallah, Tepi Barat, di bawah kepemimpinan Maha Abu Susheh, seorang wanita Palestina. Meskipun Israel menolak mengizinkan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, masuk ke Ramallah, upacara peresmian dilakukan di Amman, Yordania. Pembentukan Konsulat Kehormatan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Indonesia untuk menawarkan bantuan kepada Palestina, khususnya dalam pengembangan kapasitas. Namun, tanggapan negatif dari Israel diperkirakan akan menimbulkan tantangan bagi Indonesia dalam mendukung Palestina, yang berpotensi memengaruhi hubungan diplomatik dengan negara-negara pendukung Israel, seperti AS dan sekutunya. Penolakan Israel atas kunjungan Menlu Retno Marsudi ke Ramallah yang merupakan bagian dari wilayah Otoritas Palestina dapat dianggap sebagai pesan peringatan yang ditujukan kepada Indonesia.

Selanjutnya dalam kasus Perang Gaza yang dikategorikan sebagai Genosida, telah mengakibatkan korban jiwa di pihak Palestina mencapai 61.709 meninggal, 11.588 orang terluka, sedangkan di pihak

Israel 1.139 orang meninggal dan 8.730 orang terluka (Aljazeera, 3 Februari 2025), korban ini belum termasuk orang Palestina yang menjadi pengungsi dan orang yang kehilangan tempat tinggal sekitar 1,5–2 juta orang. Perang dimulai dari serangan ribuan Roket Katyusa oleh Hamas yang disebut sebagai Operasi “Badai Al Aqsa” ke wilayah Israel pada 7 Oktober 2023 yang mengakibatkan 1.400 orang Yahudi meninggal, 2.500 orang Yahudi luka, dan 252 orang menjadi tawanan HAMAS. Tanggal 9 Oktober 2023 Israel membalas dengan menyerang HAMAS di kota kota Beit Hanoum, Rafah, dan Gaza Selatan yang menewaskan 4.000 orang meninggal dan 2.000 orang luka-luka. Gempuran Israel terus berlanjut hingga hari ini, diselingi gencatan senjata 19 Januari 2025, dan mulai dilanggar Israel di awal April 2025.

Cara pemerintah Indonesia menunjukkan dukungan politik terhadap warga Palestina di Gaza adalah melalui upaya diplomasi yang intensif, baik secara bilateral, multilateral, maupun regional. Pemerintahan Presiden Jokowi melakukan lobi diplomatik multilateral dengan menghadiri KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Riyadh, Arab Saudi, pada 11 November 2023. Menlu Indonesia bersama dengan perwakilan Arab Saudi, Qatar, Yordania, Mesir, Turki, Nigeria, dan Palestina menjadi wakil OKI dalam mencari solusi untuk masalah Palestina. Selain itu, Indonesia juga melakukan diplomasi bilateral dengan negara-negara pemilik hak veto di Dewan Keamanan PBB. Diawali dengan kunjungan Presiden Jokowi ke Amerika Serikat untuk bertemu Presiden Joe Biden pada 13 November 2023, diikuti oleh kunjungan Menlu Retno Marsudi ke Tiongkok (20 November 2023), Rusia (21 November 2023), Inggris (22 November 2023), dan Prancis (24 November 2023). Tujuan kunjungan ini adalah untuk mendesak negara-negara pemilik hak veto agar segera memberlakukan gencatan senjata dan menghentikan perang secara permanen (BBC News, 2023). Meskipun respons dari negara-negara yang dikunjungi tidak menunjukkan dukungan yang signifikan, upaya diplomasi ini merupakan catatan penting dalam perjuangan Indonesia mewujudkan perdamaian dunia dan penghapusan penjajahan, yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya, Menteri Luar Negeri Retno L. Marsudi mengunjungi Den Haag pada 23 Februari 2024 untuk mendukung tuntutan Afrika Selatan yang berniat mengajukan Israel ke Mahkamah Internasional (International Criminal Court) atas dugaan pelanggaran Hukum Internasional, Hukum Humaniter Internasional, dan Hak Asasi Manusia. Namun, dukungan Indonesia tidak dapat diajukan secara resmi karena Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma yang ditandatangani oleh negara-negara pada 17 Juli 1998. Setelah itu, Menlu Retno melanjutkan perjalanannya ke New York pada 28 September 2024 untuk berpidato di depan Sidang Majelis Umum PBB. Dalam pidatonya, Menlu Retno secara tegas meminta PBB agar segera memberlakukan gencatan senjata dan menghentikan konflik secara permanen, memberikan keadilan bagi bangsa Palestina, mengakui kemerdekaan Palestina sebagai negara, serta menerapkan penyelesaian “Dua Negara” (*Two-State Solution*).

Dari uraian di atas, posisi Indonesia di panggung internasional sangat jelas: konsisten, berprinsip, dan tegas mendukung perjuangan Palestina untuk meraih kemerdekaannya. Indonesia telah mengakui kemerdekaan Palestina sejak 1988 (Sidqi, 2004), setelah Ketua PLO Yasser Arafat mengumumkan kemerdekaan Palestina secara sepihak. Saat ini, 144 dari 193 negara anggota PBB telah mengakui Palestina sebagai negara. Posisi ini memberikan kepercayaan kepada Indonesia untuk menerima pengungsi Gaza. Namun, kebijakan menerima pengungsi Palestina di Indonesia menimbulkan sejumlah persoalan yang kompleks. Dalam konteks kekerasan yang tergolong genosida dan pembersihan etnis, mendorong kelompok yang menjadi korban untuk pindah dari wilayahnya justru dapat dianggap mendukung agenda pelaku kekerasan. Selain itu, pemerintah Indonesia memiliki catatan yang kurang baik dalam menjamin hak dan pelayanan bagi pengungsi, yang menimbulkan keraguan terkait kemampuan Indonesia mengelola penerimaan pengungsi Gaza secara efektif dan manusiawi.

Dari sisi geopolitik, jarak yang jauh, perbedaan budaya, bahasa, dan etnis dapat menimbulkan tantangan dalam integrasi sosial dan keamanan. Masalah lain adalah bagaimana memilih pengungsi berdasarkan kondisi kesehatan, jenis kelamin, usia, dan motivasi, serta risiko infiltrasi oleh pihak-pihak yang bukan pengungsi. Oleh karena

itu, akan lebih tepat jika pemerintah Indonesia mendorong negara-negara Arab seperti Mesir dan Yordania, yang memiliki kedekatan budaya, bahasa, dan etnis dengan Palestina, untuk menerima para pengungsi Gaza.

Masalah Yaman dan Arab Spring

Konflik Yaman dengan Arab Saudi telah menyulitkan posisi Indonesia mengingat Indonesia mempunyai hubungan yang baik dengan keduanya, lebih dekat dengan salah satu akan dianggap memusuhi yang lain. Yaman adalah negara di Semenanjung Arab yang diapit oleh Selat Bab el Mandep dan Samodra Hindia, bertetangga dengan Arab Saudi. Meskipun bertetangga dua negara ini mempunyai identitas yang berbeda. Arab Saudi sebagai pemangku dua kota suci umat Islam bermahzab Sunni, dan termasuk negara kaya dengan pendapatan perkapita 58.886,86 US \$ (<https://id.tradingeconomics.com>) , Sementara Yaman sebagian besar penduduknya bermahzab Syiah Zaidi, bukan termasuk negara kaya dengan pendapatan perkapita 859,01\$ US (<https://id.tradingeconomic>), dan mempunyai suku yang beragam dan berafiliasi dengan negara lain yang terikat secara regional. (Mustofa, A. Z., & Behman, M. B. (2022).

Konflik antara Yaman dan Arab Saudi bermula pada masa The Arab Spring tahun 2011, ketika rakyat di negara-negara Arab menuntut demokratisasi dan perubahan kepemimpinan yang telah berkuasa terlalu lama. Di Yaman, rakyat memaksa mundur Ali Abdullah Saleh, yang sudah berkuasa sejak 1978. Atas campur tangan GCC (Gulf Cooperation Council), pada 27 Februari 2012 Abdol Raboh Mansour Hadi terpilih menjadi Presiden Yaman. Akan tetapi, legitimasi Mansour Hadi terguncang ketika AQAP (Al-Qaeda in the Arabian Peninsula), yang diduga merupakan cabang dari Al-Qaeda yang dipimpin Osama Bin Laden, hadir di Yaman dan melakukan teror terhadap Mansour Hadi (Mustofa, A. Z., & Behman, M. B., 2022). Keadaan semakin menjadi rumit ketika Houthi, kelompok Syiah, merebut ibukota Sana'a tanpa ada perlawanan dari militer karena tidak diakomodasikan oleh kelompok Mansour Hadi dalam pemerintahan. Pada akhirnya, Mansour Hadi melarikan diri ke Arab Saudi, dan Saudi mulai menyerang Yaman

untuk mencegah Houthi berkuasa, sementara Iran mencampuri urusan dalam negeri Yaman dengan mendukung Houthi.

Keadaan Yaman dengan kehadiran AQAP dan Houthi yang semakin menguat mendorong Raja Arab Saudi Mohammad bin Salman mendirikan aliansi militer yang bernama “Aliansi Militer Islam” atau lebih dikenal sebagai Islamic Military Counter Terrorism Coalition (IMCTC) pada 15 Desember 2015. Aliansi yang terdiri dari 34 negara, termasuk Qatar, Uni Emirat Arab, Turki, Malaysia, Pakistan, dan Nigeria. Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel al Jubeir, mengklarifikasi bahwa tujuan utama Aliansi adalah untuk membentuk koalisi negara-negara Islam untuk berbagi informasi dan pelatihan, serta untuk menyediakan angkatan bersenjata untuk mengatasi gerakan militer yang mengarah pada terorisme seperti Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan Al Qaeda. Namun, efektivitas aliansi sebagai solusi untuk terorisme global masih menjadi bahan perdebatan.

Aliansi yang berkantor pusat di Riyadh, Arab Saudi, telah menghadapi kritik karena semakin memecah belah Dunia Islam dan menetapkan kriteria yang tidak jelas untuk keanggotaan (Gallier, 2020). Aliansi ini lahir di tempat lahirnya Islam dan di negara yang bertugas menjaga dua kota suci Muslim, yaitu Makkah dan Madinah. Alih-alih mempromosikan persatuan, aliansi tersebut mengintensifkan perpecahan di dunia Islam.

Indonesia dengan tegas menolak bergabung dengan Aliansi Militer Islam alasan utama yaitu prinsip politik luar negeri bebas aktif dan keanggotaan Indonesia di dalam Gerakan Non Blok mencegah Indonesia bergabung dengan aliansi militer apapun (The Jakarta Post, 16 Desember 2015, laporan Arquerite Afra Sapii) Alasan Kedua, Aliansi ini semakin memecah belah Dunia Islam yang sudah terbagi secara Mazhab Sunni-Syiah, Moderat-Radikal, Kaya – Miskin, Aliansi Militer Islam ini memecah belah Dunia Islam ke dalam kriteria yang kurang jelas, mendukung-menolak aliansi. Ketiga, aliansi militer Islam ini mengarah untuk memerangi sesama negara Islam yaitu Yaman dengan alasan memerangi terorisme AQAP dan Houthi, Irak dan Suriah untuk memerangi ISIS. (Wicaksana, 2022). Dalam masalah ini, Indonesia mempunyai komitmen untuk mendamaikan bukan mendukung yang satu mengesampingkan yang lain. Kebijakan

pemerintah Indonesia yang menolak bergabung dengan Aliansi Militer Islam ini dianggap kebijakan yang tegas, berprinsip, mandiri, dan berani. Indonesia tidak merasa terancam mengingat sebelumnya Kantor Kedutaan Besar Indonesia di Sana, ibukota Yaman menjadi sasaran Bom dan mengakibatkan kerusakan yang parah. Alasan pemerintah Saudi salah sasaran karena yang menjadi target adalah penyimpanan (depot) amunisi di dekat KBRI. (Laporan Sabrina Asril, KOMPAS, 20-04-2015).

Penolakan Indonesia untuk bergabung dengan aliansi militer Islam diimbangi dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi pada bulan 18 Januari 2016 untuk melakukan pertemuan dengan Raja Salman bin Abdul Aziz, kunjungan ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Indonesia yang sedang menurun, dan terlebih lagi untuk mendamaikan hubungan yang tidak harmonis antara Arab Saudi dengan Iran. Sebelumnya Menlu Retno sudah melakukan kunjungan ke Iran pada 13 Januari 2016 untuk menemui Menlu Iran Javad Zarif, dan Presiden Iran Hassan Rouhani. Tujuan kunjungan ini untuk menyampaikan surat dari Presiden Jokowi yang berisi permohonan agar Iran berdamai dengan Arab Saudi.

Hubungan dua negara Teluk Arab kaya minyak ini kurang harmonis khususnya sejak revolusi Islam Iran 1979. Arab Saudi yang sangat dekat dengan Amerika Serikat dan bermazhab Sunni, sedangkan Iran yang sangat anti dan dimusuhi Amerika Serikat bermazhab Syiah mempunyai kepentingan yang jauh berbeda di region Timur Tengah dan Teluk. Arab Saudi sering mendukung kelompok bermazhab Sunni di suatu negara, sebaliknya Iran mendukung kelompok Syiah misalnya keterlibatan dua negara ini di Lebanon dan Yaman. Saat ini ketegangan dua negara Teluk ini mereda, selain Indonesia ada China yang juga berupaya mendamaikan.

Untuk konflik Iran dengan masyarakat internasional khususnya Amerika Serikat yang menuduh Iran mengembangkan nuklir untuk senjata pemusnah massal. Indonesia, sebagai negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada waktu itu memberi dukungan dengan abstain pada pemungutan suara yang ke dua di Dewan Keamanan PBB ketika Iran akan diberi sanksi menurut Resolusi DK PBB no 1747. Iran

dianggap melanggar kesepakatan NPT (Non Proliferation Treaty) dengan mengembangkan Uranium. Menurut Presiden Iran Ahmadinejad ketika berkunjung di Jakarta pada tahun 2006, nuklir Iran untuk kepentingan listrik dan medis /kesehatan. Menurut laporan IAEA (International Atomic Energy Agency) ada indikasi pengembangan uranium Iran yang melebihi batas yang disepakati dalam JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action). Iran dikenakan sanksi seperti pembekuan aset, larangan perjalanan ke Iran, dan embargo perdagangan.

Peristiwa lain dari *The Arab Spring* di Suriah menyulitkan sikap Indonesia atas pergolakan politik yang terjadi di negeri Syam itu. Jika Indonesia lebih pro pada rakyat Suriah dan komunitas internasional untuk menggulingkan Presiden Suriah Bashar al Assad maka hal tersebut merupakan preseden Indonesia sebagai negara pendukung kudeta yang bagaimanapun merupakan tindakan illegal. Tetapi jika Indonesia mendukung Presiden Bashar Al Assad untuk bertahan maka berarti Indonesia mendukung kekerasan negara yang dilakukan terhadap rakyatnya sendiri. The Arab Spring di Suriah diawali pada 15 Maret 2011 ketika sekelompok anak sekolah menggelar demonstrasi dengan tulisan “Revolusi Suriah 2011 Melawan Bashar al Assad” di kota kecil Deraa yang ditumpas oleh tentara.

Selanjutnya konflik internal Syria menjadi konflik yang paling rumit di antara konflik akibat *the Arab Spring*. Konflik internal ini melibatkan negara lain yang mendukung salah satu pihak yang konflik. Pihak pemerintah Bashar Al Assad didukung oleh Iran, Rusia, dan China. Sementara pihak anti Bashar yang tergabung dalam Syrian National Coalition atau National Coalition for Syrian Revolution and Opposition Forces didukung oleh AS, Inggris, Perancis, Arab Saudi, Turki. (Ali, N. Din., et al, 2024). Akibat konflik yang dapat dikategorikan sebagai Perang Saudara ini yaitu 2,5 juta orang kehilangan tempat tinggal dan sekitar 6,8–15 juta orang menjadi pengungsi (Saleem, Z. B., Khan, I., & Khurshid, Z. 2024). Pada akhirnya Bashar al Assad dapat diturunkan kemungkinan karena dukungan kekuatan luar. Meskipun demikian bukan berarti stabilitas politik sudah terwujud di Suriah.

Dalam konflik internal Suriah, Indonesia tidak mengambil peran sebagai penengah ataupun fasilitator bagi pihak yang berkonflik, melainkan lebih fokus pada menerima pengungsi (Ali, M., Briskman, L., & Fiske, L., 2016). Meskipun Indonesia belum menandatangani Konvensi Pengungsi 1951 (Refugees Convention), selama ini Indonesia tetap menerima pengungsi dari Timur Tengah, khususnya Suriah dan Afghanistan untuk alasan kemanusiaan. Pengungsi Suriah banyak ditampung di Cisarua, Jawa Barat, dengan jumlah sekitar 3.000–5.000 orang (Ali, M., Briskman, & Fiske, L., 2016).

Demikian pula pada konflik internal Mesir, ketika Presiden Mohamed Morsi dari Ikhwanul Muslimin digulingkan oleh militer yang dipimpin Abdul Fatah al-Sisi setelah memimpin selama satu tahun, menggantikan Husni Mubarak yang lengser setelah pemilu demokratis. Indonesia tidak mengecam penggulingan tersebut dan bahkan menerima Abdul Fatah al-Sisi di Jakarta pada tahun 2016 ketika menghadiri Pertemuan Luar Biasa OKI di Jakarta. Namun, polemik di dalam negeri Indonesia saat itu menunjukkan bahwa sebaiknya Indonesia menolak legitimasi pemimpin yang menggulingkan penguasa yang sah dan dipilih secara demokratis oleh rakyat.

Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan,

Sebagai penutup, meskipun secara geografis Indonesia berada jauh dari Timur Tengah, politik luar negeri Indonesia terhadap kawasan ini dapat dipahami melalui lensa geopolitik yang memperhitungkan posisi strategis, dinamika kekuatan global, serta interaksi antara tekanan eksternal dan nilai-nilai domestik. Indonesia memandang stabilitas dan penyelesaian konflik di Timur Tengah sebagai bagian dari kepentingan strategisnya, didukung oleh ikatan agama Islam, solidaritas dengan negara-negara *Global South*, serta komitmen pada prinsip politik luar negeri bebas-aktif yang mewarnai identitas diplomasi Indonesia.

Konsistensi dukungan Indonesia terhadap isu-isu seperti Palestina menunjukkan keberlanjutan sikap proaktif terhadap perdamaian dan stabilitas kawasan. Namun, sikap ini tidak bersifat mutlak dan tanpa kompromi. Dalam praktiknya, kebijakan luar negeri Indonesia juga menunjukkan pragmatisme strategis, termasuk dalam

hubungan dengan Israel untuk pemenuhan kebutuhan pertahanan nasional, yang menandai adanya negosiasi kompleks antara prinsip normatif dan realitas geopolitik. Pendekatan geopolitik ini membantu menjelaskan bagaimana Indonesia menavigasi ketegangan tersebut, sehingga politik luar negeri Indonesia di Timur Tengah menjadi refleksi dari dialektika antara nilai domestik dan tekanan global yang terus berlangsung hingga saat ini.

Bagi Indonesia dan negara-negara Timur Tengah, ikatan agama (Islam) menjadi jembatan yang kuat, ditambah dengan persamaan orientasi politik luar negeri Non-Blok dan posisi mereka sebagai bagian dari *Global South*. Sebagai bagian dari *Global South*, komitmen Indonesia terhadap kerja sama Selatan-Selatan (*South-South Cooperation*) menunjukkan konvergensi kepentingan normatif, seperti pengalaman anti-kolonialisme, dengan kepentingan material untuk memperkuat posisi dan mendapatkan dukungan di forum internasional. Peran Islam ini tidak hanya sebatas sentimen keagamaan, melainkan juga menjadi aset penting dalam membentuk identitas kebijakan luar negeri Indonesia, terutama dalam isu-isu yang melibatkan dunia Muslim seperti konflik Palestina-Israel. Ikatan keagamaan, orientasi politik luar negeri, dan kesamaan geografis tersebut, ditambah dengan prinsip dan tujuan politik luar negeri Indonesia yakni turut melaksanakan ketertiban dunia dan mewujudkan perdamaian internasional, mendorong Indonesia untuk terus berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik-konflik di Timur Tengah. Partisipasi aktif ini tidak hanya terbatas pada isu Palestina, melainkan juga meliputi upaya mediasi dan kontribusi dalam meredakan ketegangan antar-negara di kawasan, seperti peran Indonesia dalam penyelesaian konflik sektarian antara Arab Saudi dan Iran pada tahun 2016, yang dilandasi oleh kepentingan nasional untuk menjaga stabilitas regional.

Semua Presiden Republik Indonesia tanpa terkecuali menunjukkan kepedulian terhadap persoalan Timur Tengah, sehingga politik luar negeri Indonesia memiliki identitas yang kuat di panggung internasional sebagai negara yang berpihak pada kemerdekaan dan kedaulatan, anti penjajahan, dan peduli terhadap isu-isu kemanusiaan. Secara khusus, dalam mempromosikan perdamaian di konflik Israel-Palestina, Indonesia telah mengoptimalkan berbagai jalur diplomasi

(*multi-track diplomacy*), melibatkan tidak hanya pemerintah namun juga elemen masyarakat sipil, untuk mendukung penyelesaian konflik secara komprehensif dan berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia yang secara konsisten mendukung solusi dua negara dalam konflik Palestina-Israel, menegaskan komitmen Indonesia pada perdamaian yang adil dan berkelanjutan di kawasan.

Konsistensi dukungan ini telah menjadi ciri khas diplomasi Indonesia, sebagaimana ditelaah dalam berbagai kajian yang melihat bagaimana pemerintah Indonesia secara berkelanjutan memainkan perannya dalam resolusi konflik di Timur Tengah, baik melalui jalur diplomasi konsisten maupun adaptasi strategis sesuai dinamika regional dan global. Pilihan untuk memprioritaskan kawasan Timur Tengah bukan tanpa tantangan, terutama ketika Indonesia dihadapkan pada dilema antara menegakkan prinsip politik luar negeri dan kepentingan nasional, atau mengikuti tekanan dari negara lain untuk berpihak dalam konflik. Dinamika konflik di Timur Tengah tidak hanya terbatas pada isu klasik Palestina-Israel, namun juga diperumit oleh gelombang gejala politik internal yang masif seperti *Arab Spring*. Selain itu, ketegangan antar-negara regional, seperti antara Arab Saudi dan Iran, seringkali diperparah oleh dilema keamanan, di mana upaya satu pihak untuk meningkatkan pertahanannya justru menimbulkan rasa tidak aman pada pihak lain, perlombaan senjata dan memperdalam konflik. Prinsip politik luar negeri Indonesia yang “bebas dan aktif” terbukti menjadi pedoman (*guidance*) untuk tidak terjebak dalam arus geopolitik internasional yang tidak menentu arah dan tujuannya.

Bapak dan Ibu yang saya hormati,

Sebagai akhir dari pidato saya ini, perkenankan saya mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan rahmat, berkah, dan pertolongan-Nya sehingga saya dapat berdiri di hadapan Bapak dan Ibu sekalian untuk menyampaikan pidato pada pengukuhan Guru Besar pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah menetapkan saya sebagai Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik, Universitas Gadjah Mada. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Rektor Universitas Gadjah Mada, Senat Akademik, Dewan Guru Besar, Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Dr. Wawan Mas'udi, M.P.A yang telah menyetujui kenaikan pangkat saya. Juga kepada Wakil Dekan I, Ibu Prof. Poppy Sulistyaning Winanti, MPP, MSc, PhD; Wakil Dekan II, Bapak Dr. Noerhadi Susanto, MA; dan Wakil Dekan III, Ibu Fina Inayati, PhD, yang telah banyak membantu kami dalam proses verifikasi makalah-makalah. Terima kasih juga saya tujukan kepada Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Prof. Nur Rahmat Yuliantoro, PhD, yang telah memberikan persetujuan pengusulan saya sebagai Guru Besar. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Direktorat SDM UGM, yang telah membantu dalam pengurusan kenaikan jabatan Guru Besar ini.

Naskah pidato ini tidak bisa saya sampaikan ke hadapan Bapak dan Ibu sekalian tanpa review dari kolega yang baik hati; untuk itu saya sampaikan terima kasih yang tidak terhingga pada Bapak. Prof. Mochtar Masoed, PhD, dan Ibu. Prof. Poppy Sulistyaning Winanti, MPP, MSc, PhD, masukan dan kritikan akademik sungguh sangat bermanfaat. Ibarat obat kritikan-kritikan itu pahit rasanya tetapi ternyata menyehatkan dan menguatkan.

Terima kasih kepada Dosen-dosen dan kolega saya di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, FISIPOL UGM, yang telah menyumbang dalam pembentukan sikap akademis dan pengembangan karier saya di Departemen ini sejak tahun 1986.

Almarhum Prof. Dr. Idris A. Kesuma, Drs. Ismail Gani (Alm), Dra. Sulistyati Ismail Ghani (Alm), Drs. Herqutanto (Alm), Drs. Sugiono, MA (Alm), Prof. Yahya Muhaimin (Alm), Dr. Rizal Panggabean (Almr), Dr. Riza Nor Arfani (Almr), Prof. Ichlasul Amal (Alm), Prof. Amien Rais, PhD, Dr. Nanang Pamuji Mugosejati, Dra. Illien Halina, SU, Drs. Usmar Salam, MSi, Prof. M. Mochtar Mas'oed, PhD, Prof. Poppy Sulistyaning Winati, PhD, Prof. Nur Rahmat Yuliantoro, PhD, Prof. Dr. Dafri Agus Salim, MA, Drs. Muhadi Sugiono, MA, Dra. Siti Daulah Khoiriyati, MA, Dr. Ririn Tri Nurhayati, Dr. Randy Wirasta Nandyatama, MSc, Dr. Muhammad Rum, Dr. Luqman nul Hakim, Dr. Deddy Permadi, Dr. Maharani Hapsari, Dr.

Diah Kusumaningrum, Dr. Daniel Petz, Rochdi, Mohan Nazala, PhD, Yulida, SIP, MA, Suci Lestari Yuana, PhD, Atin Prabandari, PhD, Arinda Nitisari, SIP, MA.

Kolega yang sedang tugas belajar: Irfan, SIP, MA; Rizky Alif Alvian, SIP, MA; Raras, SIP, MA; Adiputra, SIP, MA; Ayu Diasti, SIP, MA; Trevi, SIP, MA. Juga untuk staf DIHI yang telah membantu menyempurnakan proses kenaikan jabatan ini: Bapak Edi Priyono, SIP; Ibu Ivana Mandasari, S.Pd; Ibu Tri Nayati, S.Pd; Ibu Rini Kusumawati, SE, MM.

Tim Pengembangan DIHI: Laila Maharani, SP; Syafa Azmi; Syakira, M.Pd; Rifqie Zullian, SIP; Amirah Syahirah, S.Sos; Galih Fatria Akbar, SIP; Tri Nur Chasanah, SIP; Nurhawira Gigih Pramono, SIP. Staf IIS yakni Nabilah Nur Abiyanti, Inggit Kartika Dini, Najwa Ahila Al-Awwaliyah Kusumawardani, Nadya Zafira, Anggita Fitri Ayu Lestari, Irene Jihan Chatarina, Tria Nadila Desanti Margono, Gabriel Jovan Adidharma, Chivalrous Elnatan Nugrajati, Dian Adi Marianto.

Salam ta'dzim dan terima kasih saya sampaikan kepada guru-guru saya yang telah mengajari saya membaca, menulis, dan berhitung sebagai bekal menjalani kehidupan saya selanjutnya, yaitu guru-guru saya di TK Masjid Suhada, SD Negeri Ungaran Yogyakarta, SMP Negeri 8 Yogyakarta, SMA Negeri 1, serta pembimbing S2 saya di School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London, Prof. Charles Tripp. Terima kasih juga saya tujukan kepada para mantan atasan saya: Prof. Dr. Syamsul Hadi, SU, MA, pada Kajian Timur Tengah di Sekolah Pascasarjana UGM; Prof. Dr. Sangidu, SU, di Kajian Timur Tengah FIB UGM; Prof. Laksono, PhD, dan Prof. Irham pada Pusat Studi Asia Pasifik; Prof. Dr. Sutaryo, PhD, Ketua Senat Akademik UGM; serta Prof. Dr. Widya Asmara, Ketua Komisi II Senat Akademik UGM (2007–2012).

Terimakasih juga saya sampaikan pada para mahasiswa dan mantan mahasiswa S1, S2, dan S3 khususnya mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Tanpa mahasiswa saya bukan dosen dan Guru Besar. Mahasiswa yang penuh dengan dinamika akademik telah banyak mendukung sikap akademik saya.

Ungkapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para Duta Besar yang telah mempersilahkan saya dan suami untuk tinggal di

Wisma Indonesia dan memberikan masukan tentang Timur Tengah dalam penelitian kami, yaitu: Bapak Abdullah Syarwan, SH, dan Bapak Dr. Hajriyanto Thohari (Duta Besar RI untuk Lebanon); Bapak Dr. KH. Abdul Wakhid Maktub dan Bapak Deddy Saiful Hadi, SE (Duta Besar Qatar); Bapak Dr. Muzammil Basyuni (Almarhum, Duta Besar RI untuk Suriah); Bapak Dr. Abdurrahman M. Fachir (Duta Besar Mesir dan Wakil Menteri Luar Negeri), Bapak Drs Djoko Susilo (Alm) (Duta Besar RI Untuk Swiss dan Ibu Dra. Hj. Yuli Mumpuni (Duta Besar RI untuk Aljazair, dan Spanyol).

Menyambung tentang tempat sekolah, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekolah saya yang saat ini hadir di gedung ini, yaitu teman-teman TK Masjid Suhada seperti, teman-teman SD Ungaran, teman-teman SMP Negeri 8, teman-teman SMA Negeri 1, serta teman-teman kuliah S1 pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIPOL UGM angkatan tahun 1979. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman Program Kapal ASEAN Nippon Maru tahun 1982 (Ship for Southeast Asian Youth Program), termasuk Ibu Rektor Prof. Ova Emilia, PhD.) Secara khusus saya sampaikan terimakasih untuk dua sahabat kuliah saya Ibu Prof. Dr. Hartuti Purnaweni, MPA, dan Ibu Dra. Liri Lestari

Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengekspresikan rasa cinta kasih, syukur dan terimakasih kepada kedua orang tua yang telah mengukir jiwa raga saya, dan mengenalkan saya untuk mengenal Tuhan, Allah Swt, taat menjalankan perintah-perintahNya dan menjauhi larangan-laranganNya kepada Bapak Drs.H Abdulhayi Adnan (almh), dan Ibu Hj Masadah Abdulhayi. Juga kepada Ibu mertua saya Ibu Hj Siti Maemunah (almrh). Kepada paman paman saya yang telah memberi inspirasi sekolah di Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIPOL-UGM, Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Paman Abdul Nur Adnan (Penyiar VOA), dan Paman Abdulhadi Adnan (Duta Besar RI untuk Sudan). Saya juga ingin mengungkapkan rasa terimakasih dan syukur sekali lagi mempunyai saudara kandung yang luar biasa yang bisa menggantikan kedua orang tua kami mas Ahmad Wirawan Adnan, SH, Mhum dan istri mbak Ir Endang Ruslina (Almrh), Mas Dr. Masykur Wiratmo, MSc, (almrh) dan istri Mbak Siti Aminah, Spd. Adik-adik saya, Dr. Arif Setiawan, SH,

Mhum, dan istri Yuliani, Wiwik Adawiyah Yuliarti, SE dan suami Yoyok Suryokuncoro, SE, MBA, Zaki Setiadi, ST, MM dan istri Rina Sophistiakari, SE. Saya juga mengucapkan terimakasih kepada besan saya Ibu Salman, dan Bapak Yoyok serta Ibu Dita. Saya juga berterima kasih pada Saudara-Saudara Ipar yang baik hati, Mas Thamrin, Mbak Yanti, Mas Pin, Mbak Har, Mas Rudi dan Mbak Sri, dik Iin, dik Santo dik Hawin, dik Yunan, dik Nisa, dik Lia, dik Lutfi, dik Helip, dan dik Maya. Juga pada semua ponakan ponakan semua yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Terimakasih juga saya sampaikan untuk asisten kami Harmini dan Emak Masruri yang telah membantu kami selama lebih dari 15 tahun.

Terakhir dan paling utama, secara khusus saya ingin mengucapkan terimakasih pada suami tercinta, almarhum Prof. Dr. Luqman Hakim MSc yang telah mendampingi dengan setia selama 39 tahun, yang telah meninggalkan kami semua saat proses Guru Besar ini baru dimulai. Menjalani hidup tanpanya sungguh terasa seperti *Flying Without Wing* , dan kadang *I don't like to sleep alone* tetapi kami mempunyai anak-anak yang hebat yang bisa menggantikan kasih sayang ayahnya, selalu ada setiap saya butuhkan mereka adalah; Muhammad Insan Cita Pratama, SIP, SH, LLM, dan istri Sitta Noviana, SIP , MAP, Muhammad Read Bismillah, SIP dan istri Arini Srinindita, SIP, serta anak ragil kami Afia Cita Fitriana, SH. Rasa syukur juga saya sampaikan pada kedua cucu kami Muhammad Rayhan Fatahillah, dan Kaylila Kirana Sophia. Sungguh keluarga inti dan keluarga besar, dan teman teman yang baik hati ini telah meyakinkan saya *I Believe I Can Fly, I Believe I can touch the sky* (lagu kesukaan cucu Kaylila)

Akhir kata saya mengucapkan terimakasih atas kehadiran Bapak dan Ibu di Gedung Balai Senat Universitas Gadjah Mada, Gedung kebanggaan tidak hanya civitas Akademika UGM, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Mohon maaf yang sebesar besarnya atas segala kesalahan dan kekhilafan selama penyampaian pidato saya ini. Ijinkan saya menutup pidato ini dengan sedikit pantun:

Penggaris bahasa Arabnya Mistaratun
Lapangan besar Alun Alun
Cekap semanten Maturnuwun

Yogyakarta, 19 Juni 2025

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Masyhur. (2021). Yemen'S Post-Arab Spring Conflict and Its Relationship with the Economy, Politics, and Saudi Arabia'S Influence in the Middle East. *Jurnal CMES*, 2021, 105–116.
- Alles, D. (2015). Transnational Islamic actors and Indonesia's foreign policy: Transcending the state. UK: Routledge.
- Ali, N., Din, J. U., Kousar Ali, D. M. I., & Azhar, M. (2024). The Root Causes of the Syrian Crisis: Analyzing Internal and External Factors. *Remittances Review*, 9, 211-229.
- Al-Jazeera. (2024). *Which countries recognise Palestine in 2024?* Al Jazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2024/11/29/which-countries-recognise-palestine-in-2024>
- Al Jazeera. (2025). *Updates: Israel kills Palestinians in Gaza 'safe zone' as famine fears rise.* Al Jazeera. <https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2025/5/24/live-israeli-attacks-kill-76-no-aid-relief-yet-for-besieged-northern-gaza#:~:text=Israel's war on Gaza has, the rubble are presumed dead.>
- Ali, Muzafar, Linda Briskman, L. F. (2016). Asylum seekers and refugees in Indonesia: Problems and potentials. *Cosmopolitan Civil Societies: An Interdisciplinary Journal*, 8(2), 22–43. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.5130/ccs.v8i2.4883>
- Ali, Najaf, Jalal Ud Din, Kousar Ali, Dr. Muhammad Ismail, D. M. A. (2024). The Root Causes of the Syrian Crisis: Analyzing Internal and External Factors. *Remittances Review*, 9, 211–229.
- Anderson, E W, (2005), Middle East Geography and Geopolitics. Oxford: Routledge
- Anwar, D. F. (2010). Foreign Policy, Islam, and Democracy in Indonesia. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, 3(3), 37–54.
- Ayoob, M. (2008). *The Many Faces of Political Islam: Religion and Politics in the Muslim World*. University of Michigan Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.3998/mpub.189346>

- Azra, A. (2000). Islam in Indonesian foreign policy: Assessing impacts of islamic revivalism during the soeharto era. *Studia Islamika*, 7(3), 1–29. <https://doi.org/10.15408/sdi.v7i3.701>
- Balachandran, G., & Sethi, A. (2015). Israel–Gaza Crisis: Understanding the war crimes debate. *Strategic Analysis*, 39(2), 176–183. <https://doi.org/10.1080/09700161.2014.1000668>
- Bin Khaled Al-Saud, A. (2020). Deciphering IS’s Narrative and Activities in the Kingdom of Saudi Arabia. *Terrorism and Political Violence*, 32(3), 469–488. <https://doi.org/10.1080/09546553.2017.1378645>
- Candra, R., & Mubarak, S. (2024). Islamic Diplomacy and the Palestinian Quest for Peace and Independence: An Analytical Perspective. *Mediasi Journal of International Relations*, 7(1), 1–12. <https://doi.org/10.21111/mediasi.v7i1.12543>
- Challand, B. (2009). Fatah-Hamas Rivalries after Gaza: Is Unity Impossible? *Italian Journal of International Affairs*, 44(3), 11–17.
- Chandra, Arlina Afriani, Achmad Sukendro, Arifuddin Uksan, Pujo Widodo, M. R. F. A. (2024). The Role of Indonesia in Mitigating the Humanitarian Impact of the War in Gaza through Humanitarian Assistance. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(6), 1906–1920. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jlph.v4i6.571>
- Chacar, Henriette. 2023. “Israel Revises Hamas Attack Death Toll to ‘around 1,200.’” Reuters.November 11, 2023. <https://www.reuters.com/world/middle-east/israel-revises-death-toll-oct-7-hamas-attack-around-1200-2023-11-10/>
- Cope, Z. (2015). The Palgrave handbook of contemporary heritage research. In *Choice Reviews Online* (Vol. 53, Issue 01). <https://doi.org/10.5860/choice.191903>
- Cope, Z. (2024), The Palgrave Handbook of Contemporary Geopolitics, (eBook) <https://doi.org/10.1007/978-3-031-47227-5> ©Springer Nature Switzerland AG 2024
- Dawisha, A., & Dawisha, K. (1982). *Soviet Union in the Middle East: Policies and Perspectives*. Holmes & Meier Pub.

- Dawisha, A. (1983). *Islam in Foreign Policy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dharmaputra, R., Wardhana, A., & Pratama, M. A. (2018). *Strategic Culture and Foreign Policy: Assessing Indonesian Foreign Policy under Yudhoyono (2004-2014)*. 9–20. <https://doi.org/10.5220/0010272400090020>
- Drysdale, A, Blake, G, H. (1985). *The Middle East and North Africa: A Political Geography*. Oxford University Press.
- Fogg, K. (2015). Islam in Indonesia's foreign policy, 1945-1949. *Al-Jami'ah* 53:303. doi: 10.14421/ajis.2015.532.303-305
- Goldman, Sharon MPH, Lipsky, Ari M.MD, Radimislensky, Irina BSc, Givon, Adi BSc, Almog, Ofer MD, Benov, Avi MD, Israel Trauma Group, Katorza, Eldad MD, MSC, M. (2024). October 7th Mass Casualty Attack in Israel: Injury Profiles of Hospitalized Casualties. *Annals of Surgery Open*. <https://doi.org/10.1097/AS9.0000000000000481>
- Hicks, J. (2021). A 'data realm' for the Global South? Evidence from Indonesia. *Third World Quarterly*, 42(7), 1417–1435.
- Husnul, K. (2022). Islam and Capitalism: The Dynamics of Religion and Contemporary Indonesian Work Orientation. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 19(1), 53–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/ajpif.v19i1.5226>
- Hudson, M (1977). *Arab Politics The Search for Legitimacy*, New Haven dan London: Yale University Press.
- Huwaitdin, M. Bin. (2015). The Security Dilemma in Saudi-Iranian Relations. *Review of History and Political Science*, 3(2), 69–79. <https://doi.org/10.15640/rhps.v3n2a8>
- Ibnu Asakir, & Hikmat Zakky Almubaroq. (2024). The Indonesian Defense Management Concept In Resolving The Israel-Palestine Conflict. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 3(6), 3225–3233. <https://doi.org/10.55227/ijhess.v3i6.1111>
- Kegley, CH, dan Wittkopf, E,R. (1997), *World Politics Trend and Transformation*. New York: St Martin's Press.Inc.

- Kelman, H. C. (2017). Further thoughts on the processes of compliance, identification, and internalization. In *Social Power and Political Influence* (pp. 125–171).
- Korany, B, and Dessouki, AH. (2019). *The Foreign Policies of Arab States, The Challenge of Change*. New York: Roudledge.
- Leifer, M. (1983). *Indonesia's Foreign Policy*. London: George Allen & Unwin Publisher Ltd.
- Lesch, D. W. (2018). *The Arab-Israeli Conflict: A History*. Oxford University Press.
- Maulana, M. A. (2017). *Kebijakan Pemerintah Indonesia Menolak Bergabung dalam Islamic Military Alliance to Fight Terrorism* [Universitas Muhammadiyah Yogyakarta]. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/12149>
- Muchsin, M. A. (2015). Palestina dan Israel: Sejarah, konflik dan masa depan. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 39(2), 390–406.
- Mustofa, Ahmad Zainal, M. B. B. (2022). United States and Iran Intervention In The Post-Arab Spring Conflict In Yemen. *CMES: Jurnal Studi Timur Tengah*, 15(2), 107–117. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/cmcs.15.2.58232>
- Muttaqien, M. (2013). Domestic politics and Indonesia's foreign policy on the Arab-Israeli Conflict. *Global & Strategis*, 7(1), 57–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/01436597.2021.1901570>
- Pratama, R. E., & Arum, R. (2024). *Indonesia's Role In Promoting Peace In The Israelpalestine Conflict Through Multi-Track Diplomacy*. 1(1), 1–8.
- Qodariyah, A. L. (2023). Peranan dan kepentingan nasional Indonesia dalam penyelesaian konflik antara Arab Saudi- Iran Tahun 2016. *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 8(1), 54–61.
- Rizaldi, M., & Cahyani, V. R. (2023). Peranan dan Kepentingan Nasional Indonesia dalam Penyelesaian Konflik antara Arab Saudi-Iran Tahun 2016. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 8(1), 54–61.
- Rusdianto, U., & Suharto, M. (2024). *The Journal of Academic Science Indonesia's Active Free Politics in the Two-State Solution Hamas-Israel Conflict*. 1(4), 323–334.

- Sahide, A., Cipto, B., Muti'ah Setiawati, S., & Hadi, S. (2015). The Arab Spring: Membaca Kronologi dan Faktornya Penyebabnya. *Jurnal Hubungan Internasional*, 4(2), 118–129. <https://doi.org/10.18196/hi.2015.0072.118-129>
- Saleem, Zarar Bin, Immtiaz Khan, Z. K. (2024). The Fall of Bashar al-Assad: Implications for Syria and the Broader Middle East. *Dialogue Social Science Review (DSSR)*, 2(5), 752–764.
- Sapiie, Afra, M. (2015). *Indonesia yet to decide on Saudi-led military coalition*. TheJakartaPost. <https://www.thejakartapost.com/news/2015/12/16/indonesia-yet-decide-saudi-led-military-coalition.html>
- Sekretariat Presiden. (2023). *Keterangan Pers Menlu Retno Marsudi Terkait Hasil KTT Luar Biasa OKI, Riyadh, 11 November 2023*. <https://www.youtube.com/watch?v=cJfdOSKwOmQ>
- Setiawati, S. M. (2024). The role of Indonesian government in middle east conflict resolution: consistent diplomacy or strategic shifts? *Frontiers in Political Science*, 6(March). <https://doi.org/10.3389/fpos.2024.1304108>
- Songbatumis, A. (2021). The Role of Islam in Indonesian Foreign Policy: A Case of Susilo Bambang Yudhoyono Introduction. *Polish Political Science Yearbook*, 50(2), 1–23. <https://doi.org/10.15804/ppsy202119>
- Suryadinata, L. (1995). Islam and Suharto's Foreign Policy: Indonesia, the Middle East, and Bosnia. *Asian Survey*, 35(3), 291–303. <https://doi.org/10.1525/as.1995.35.3.01p0006k>
- Suryadinata, L. (1996). *Indonesia's Foreign Policy Under Suharto: Aspiring to International Leadership*. Singapore: Times Academic Press.
- Tartir, A. (2017). *The Palestinian Authority security forces: whose security?* Al-Shabaka The Palestinian Policy Network. <https://al-shabaka.org/briefs/the-palestinian-authority-security-forces-whose-security/>
- Teitelbaum, P. J. (2016). *Domestic and Regional Implications of Escalated Saudi-Iran Conflict*. 324.
- The New York Times. (2024). *Assad Arrives in Russia After Fleeing Syria, Russian Media Says*. The New York Times.

<https://www.nytimes.com/live/2024/12/08/world/syria-war-damascus>

Trading Economics. (2023a). *Saudi Arabia GDP per capita PPP*.

Trading Economics. (2023b). *Yamen-PBD Per Kapita*.
[https://id.tradingeconomics.com/yemen/gdp-per-capita#:~:text=PDB per Kapita di Yaman rata-rata sebesar, makro global Trading Economics dan ekspektasi analisis](https://id.tradingeconomics.com/yemen/gdp-per-capita#:~:text=PDB per Kapita di Yaman rata-rata sebesar,makro global Trading Economics dan ekspektasi analisis).

Tzoreff, Yohanan, K. M. (2022). *A Discussion at INSS on Hamas-Fatah Reconciliation Efforts*. Institute for National Security Studies (INSS).
<https://www.inss.org.il/publication/hamas-fatah-reconciliation/>

UNHCR Indonesia. (2023). *Sekilas Data*. UNHCR Indonesia.
<https://www.unhcr.org/id/who-we-are/sekilas-data>

Wicaksana, I. G. W. (2022). Why does populism not make populist foreign policy? Indonesia under Jokowi. *Australian Journal of International Affairs*, 76(6), 634–652.

Winanti, P. S., & Alvian, R. A. (2021). Indonesia's South–South cooperation: when normative and material interests converged. *International Relations of the Asia-Pacific*, 21(2), 201–232.
<https://doi.org/10.1093/irap/lcz021>

Yeranian. (2015). *Saudi-led Airstrikes Hit Yemen's Houthi Rebels*. VOA.
<https://www.voanews.com/a/saudi-led-airstrikes-hit-yemen-houthi-rebels/2726922.html>